

Jurnal EKSISTANSI

ISSN 2085-2401

(JURNAL ILMIAH BIDANG AKUNTANSI, EKONOMI DAN BISNIS)

Vol. 1 No. 2, Agustus 2009

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Hubungan antara Penganggaran Partisipatif dengan *Slack Anggaran*
Maria

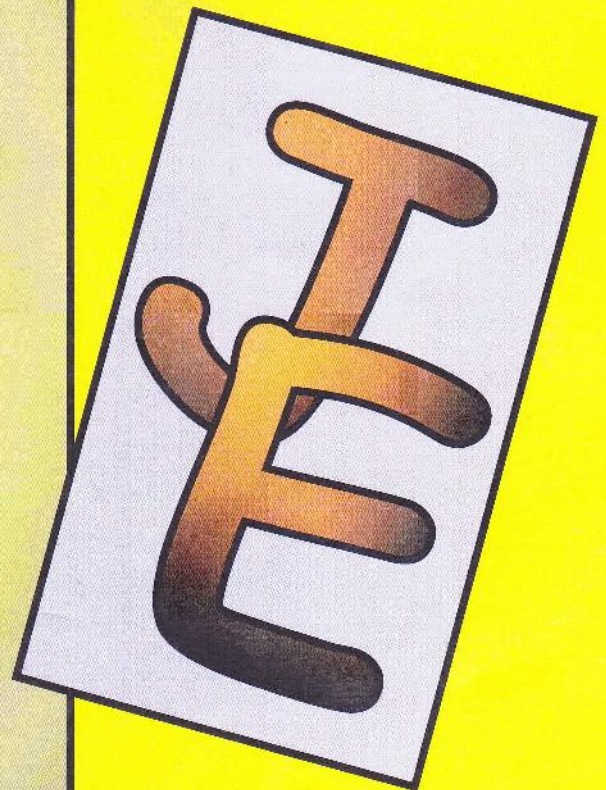
Perbankan Syariah sebagai Alternatif Transaksi Bisnis dan Ekonomi Masyarakat Periansya

Penerapan Perencanaan Pajak atas Penghasilan Karyawan dan Pengaruhnya pada Pajak Penghasilan Badan PT Pupuk Sriwijaya
Indri Ariyanti dan Zulkarnaini

Peran Akuntan dalam Mengawal dan Mencegah Krisis Keuangan
Aladin dan Riza Wahyudi

Electronic Communication and Its Negative Impacts: The Challenge for Accountants
Ahmad Soediro

Peranan *Due Audit Care* Seorang Auditor dalam Melaksanakan Pemeriksaan
L. Vera Riama P.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

E-mail: jurnal.eksistansi@yahoo.com



Volume 1

Nomor 2

Halaman
49 - 98

Palembang
Agustus 2009

ISSN 2085-2401

REDAKSI

Penanggung Jawab

Aladin, S.E., Ak.

Editor

Rita Martini, S.E., M.Si., Ak.
Anggeraini Oktarida, S.E., Ak.

Pemimpin Redaksi

Ardiyanto, S.E.

Penata Letak

Maulan Irwadi, S.E., Ak.
Choiruddin, S.E.

Wakil Pemimpin Redaksi

Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak.

Erlangga Kesuma Putra, A.Md.

Sekretaris Redaksi

M. Husni Mubarak, S.E., Ak.

Humas

Susi Ardiani, S.E.
Sukmini Hartati, S.E.
Riza Wahyudi, S.E., Ak.

Staf Redaksi/Staf Ahli

Faridah, S.E., M.S.
Firmansyah, S.E.
Nelly Masnila, S.E., M.Si., Ak.
Periansya, S.E., M.M.
Maria, S.E., M.Si., Ak.
Henny Yulsiati, S.E., M.Ak.

Sirkulasi

M. Thoyib, S.E., M.Si.
Rama Asmarandana, S.E., Ak.
Haryono

Tata Cara Pemesanan Jurnal Eksistensi:

1. Kirimkan uang berlangganan melalui rekening a.n Desi Indriasari.
2. Kirimkan daftar jurnal yang dipesan (Volume, Nomor, dan Tahun Jurnal) dengan melampirkan fotocopi resi pengiriman/bukti setor uang berlangganan.
3. Pesanan akan dikirim ke alamat pemesan segera setelah bukti setor diterima.

PERPUSTAKAAN JURUSAN AGRIKULTUR POLITEKNIK RESILIENSI	
No. INVENTARI	
TANGGAL	24 Mei 2010
ASAL/SUMBER	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Eksistensi dapat kembali hadir pada volume pertama nomor kedua. Eksistensi masih konsisten menyajikan permasalahan Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis baik untuk penyebarluasan hasil penelitian maupun artikel konseptual yang dilakukan oleh para civitas akademika Politeknik Negeri Sriwijaya dan peneliti lainnya.

Jurnal Eksistensi, sebagai jurnal yang masih baru terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dengan segala kondisi yang serba terbatas. Perbaikan terhadap berbagai materi telah dilakukan terutama format, namun berkaitan dengan artikel belum sepenuhnya dari hasil penelitian. Hal itu dikarenakan sangat terbatasnya artikel yang masuk ke meja redaksi, dimana masih didominasi oleh kalangan staf jurusan sendiri.

Pada edisi berikutnya, Eksistensi akan tetap mengupayakan fokus pada suatu topik yang lebih spesifik dan mendorong hadirnya hasil-hasil penelitian di bidang Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis. Redaksi membuka diri bagi siapa saja yang berkeinginan menyampaikan hasil penelitian atau artikel untuk dimuat dan dipublikasikan, tentunya dengan berbagai persyaratan yang normatif sebagaimana media ilmiah lainnya.

Demikian juga dengan Mitra Bestari yang belum didapat, akan tetap diupayakan untuk mendapatkan para ilmuwan yang bersedia menjadi mitra bestari Jurnal Eksistensi.

Redaksi berharap jurnal ini akan lebih berkualitas dan dapat memberikan warna di dunia karya ilmiah khususnya bidang Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis. Semoga Eksistensi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Redaksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Maria , Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Hubungan antara Penganggaran Partisipatif dengan <i>Slack Anggaran</i>	49-56
Periansya , Perbankan Syariah sebagai Alternatif Transaksi Bisnis dan Ekonomi Masyarakat	57-64
Indri Ariyanti & Zulkarnaini , Penerapan Perencanaan Pajak atas Penghasilan Karyawan dan Pengaruhnya pada Pajak Penghasilan Badan PT Pupuk Sriwijaya Palembang	65-75
Aladin & Riza Wahyudi , Peran Akuntan dalam Mengawal dan Mencegah Krisis Keuangan	76-83
Ahmad Soediro , <i>Electronic Communication and Its Negative Impacts: The Challenge for Accountants</i>	84-90
L Vera Riama P. , Peranan <i>Due Audit Care</i> Seorang Auditor dalam Melaksanakan Pemeriksaan	91-98

PERAN AKUNTAN DALAM MENGAWAL DAN MENCEGAH KRISIS KEUANGAN

Aladin ¹, Riza Wahyudi ²

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
E-mail: aladin.akt@gmail.com, riza.wahyudi_57@yahoo.com

Abstrak

Keberadaan akuntan yang tergabung dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) oleh masyarakat luas dinilai mempunyai fungsi dan peran sangat strategis dalam meningkatkan kualitas SPI dan efisiensi perekonomian nasional secara makro maupun mikro. Melalui hasil-hasil kerja yang berkualitas baik sebagai akuntan auditor maupun akuntan manajemen, diharapkan mampu melakukan cegah dini sekaligus memberikan kontribusi proses perbaikan terhadap perilaku bisnis yang merugikan jalannya roda perekonomian dan prospek dunia usaha yang dapat berdampak terjadinya krisis ekonomi nasional. Sebuah pelajaran penting dari krisis keuangan global adalah perlunya penegakan etika dan nilai-nilai luhur dalam menjalankan roda pemerintahan dan organisasi bisnis melalui penguatan implementasi sistem pengendalian intern yang dikawal oleh akuntan profesional dan berintegritas tinggi.

Kata kunci: akuntan, mengawal dan mencegah, krisis keuangan

PENDAHULUAN

Berbagai kalangan menganggap setiap terjadi krisis ataupun kasus keuangan yang berimbas pada krisis global maka akuntan ikut dipersalahkan mempunyai peran dan tanggung jawab besar sebagai salah satu penyebabnya. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia seperti kasus jebolnya Bapindo di era Orde baru, Bank Bali, BLBI dan yang paling gress Bank Century, semua pihak menatap kinerja profesionalitas akuntan Indonesia, baik sektor akuntan publik akuntan keuangan maupun akuntan pemerintah. Posisi peran dan keberadaan akuntan dipertanyakan. Pemerintah tentu termasuk menjadi pihak yang akan ikut me-nanggung risiko dengan kondisi krisis ekonomi global. Kekhawatiran bayang-bayang krisis tahun 1998 kembali menghantui. Kita semua menyadari bahwa jika salah kelola maka krisis keuangan segera menerjang pemerintah dan dapat menjelma krisis ekonomi, krisis sosial bahkan menjadi krisis kemanusiaan. Sebuah prediksi yang perlu diantisipasi juga oleh semua pihak terkait, termasuk akuntan *internal auditor* pemerintah sebagai salah

satu pilar yang berperan mengawal jalannya roda birokrasi pembangunan.

Terkait dengan krisis global, pada kalangan auditor intern muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana mungkin sebuah negara adidaya seperti Amerika Serikat, yang notabene memiliki SPI (Sistem Pengendalian Intern), *Risk Management (RM)*, dan *governance process* yang sudah demikian maju, bisa mengalami kegagalan? Apakah kelemahan SPI menjadi penyebab timbulnya krisis? Atau ada faktor lain yang lebih dominan?. Salah satu faktor utama yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah kurangnya perhatian dan pemahaman atas sistem pengendalian intern (SPI) yang diterapkan secara memadai dalam suatu organisasi sebagai sarana penilaian yang mempengaruhi dapat dipercaya tidaknya informasi akuntansi dan sebagaimana diatur dalam standar pekerjaan lapangan kedua berbunyi sebagai berikut: "Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan".

Sistem pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor

yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Oleh karena itu, sebelum akuntan melaksanakan audit se-cara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan akuntan memahami struktur pengendalian intern yang berlaku dalam entitas.

PEMBAHASAN

Banyak pihak berpendapat krisis terjadi karena kegagalan dalam mengelola risiko (*risk management*). Disamping itu, krisis disebabkan kegagalan dalam membangun lingkungan pengendalian yang kuat. Dalam konteks ini, sebenarnya akuntan sebagai salah satu pilar utama sistem pengendalian mampu melakukan pencegahan. Sebagian besar menilai bahwa penyebab krisis keuangan adalah kegagalan dalam pengembangan lingkungan pengendalian yang kondusif. Kelompok ini memandang bahwa perilaku para eksekutif perusahaan dan masyarakat yang telah melewati batas-batas kepatutan sebagai penyebab utama munculnya krisis.

Sangat disadari oleh para pakar manajemen bahwa kualitas SPI masing-masing institusi akan menjadi penentu kelangsungan hidup. Institusi yang memiliki kualitas SPI baik, akan memiliki *recovery plan* yang baik juga dalam menghadapi krisis. Sedangkan institusi yang kualitas SPI-nya rendah akan terjerembab ke lembah kehancuran. Demikian juga pada sektor publik, dimana pemerintahan dengan kualitas SPI yang baik akan lebih kuat dalam menghadapi guncangan krisis. Sebaliknya, pemerintahan dengan SPI yang rendah akan terpuruk ke dalam krisis berkelanjutan. Krisis global ini justru semakin menunjukkan pada dunia bahwa peran SPI, RM dan *governance sistem* yang baik sangat penting bagi eksistensi dan masa depan institusi.

Penerapan SPI, RM dan *governance process* merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Hal ini berlaku baik di sektor usaha (*private*) maupun sektor pemerintahan (*publik*). Penerapan SPI, RM dan

governance process yang baik dan publik akan membuat perekonomian negara baik, lebih kuat dan tahan banting dalam menghadapi gejolak perubahan yang sering terjadi. Oleh karena itu, lahirnya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sangat diharapkan akan dapat menciptakan *internal culture* yang *built-in* secara otomatis memperkuat diterapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Good Corporate Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara serta roda perekonomian nasional.

Secara konseptual SPIP mengadopsi konsep sistem pengendalian intern yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions* (COSO). Dalam konsep COSO, sistem pengendalian intern terdiri dari 5 unsur utama, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. Untuk tujuan pemahaman atas lingkungan pengendalian, berikut ini adalah sub elemen terpenting yang harus dipertimbangkan oleh akuntan.

- a. Integritas dan nilai-nilai etika. Efektivitas struktur pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakannya. Struktur pengendalian intern yang memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pengendalian intern. Oleh karena itu tanggung jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai integritas yaitu suatu kemampuan untuk mewujudkan apa yang dikatakan atau telak menjadi komitmennya. Disamping itu,

- dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, manajer dituntut untuk mendasarkan pada etika bisnis. Nilai integritas dan etika bisnis tersebut dikomunikasikan oleh manajer melalui *personal behavior* dan *operational behavior*. Melalui *personal behavior*, manajer mengkomunikasikan nilai integritas dan etika melalui tindakan individual mereka, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diamati oleh karyawan entitas. Melalui *operational behavior*, manajer mendesain sistem yang digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan, yang mendasarkan nilai integritas dan etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk mencapai tujuan entitas, personal disetiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
- c. Dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris yang efektif adalah yang *independent* dari manajemen dan anggota-anggotanya aktif dan menaiki aktifitas manajemen. Komite audit biasanya dibebani tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup pengendalian intern dan ketaatan kepada undang-undang dan peraturan. Agar menjadi efektif, komite audit harus memelihara komunikasi yang terus menerus dengan baik dengan auditor intern maupun auditor ekstern. Hal ini memungkinkan auditor dan komite audit membahas masalah-masalah yang berkaitan seperti integritas atau tindakan manajemen. Berfungsinya dewan komisaris dan komite audit akan menciptakan iklim pengendalian yang baik dalam perusahaan.
- d. Filosofi dan gaya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic belief*) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Filosofi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: 1) apa yang menjadi alasan perusahaan dalam bisnis?, 2) bagaimana perusahaan melaksanakan bisnis?, dan 3) apa yang dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan?. Dalam bisnis, manajemen yang memiliki filosofi ini akan meletakkan kejujuran sebagai dasar bisnisnya. Laporan keuangan perusahaan ini akan digunakan sebagai alat manajemen untuk mencerminkan kejujuran pertanggung jawaban keuangan perusahaan kepada siapa saja yang berhubungan bisnis dengan mereka. Dengan demikian filosofi ini menjadi warna unik perusahaan dalam melaksanakan bisnis mereka. Contoh filosofi manajemen yang menetapkan perencanaan sebagai dasar untuk melaksanakan bisnis adalah: "kami berkeyakinan bahwa perencanaan merupakan seni untuk menyiapkan perubahan, oleh karena itu kami akan menggunakan perencanaan sebagai alat manajemen untuk membuat kami siap dalam menghadapi perubahan yang harus terjadi". Manajemen yang memiliki filosofi ini akan menjadikan semua tindakan atas dasar rencana yang disusun lebih dulu secara matang sehingga tidak ada kejadian yang terlaksana tanpa rencana semua kegiatan adalah direncanakan dengan baik, sehingga rencana kegiatan dan anggaran benar-benar digunakan sebagai tolak ukur prestasi manajemen. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. Ada manajer yang memilih gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan keuangan, penyusunan dan penggunaan anggaran sebagai alat pengukur kinerja manajer dan pencapaian tujuan yang telah dicanangkan dalam anggaran, ada manajer yang tidak



demikian. Manajemen dengan gaya operasi sentralisasi memerlukan alat control yang cenderung berbiaya tinggi, karena *sense of control* tidak tumbuh didalam diri manajemen menengah dan bawah. Manajemen perusahaan yang gaya operasinya bersifat desentralisasi akan meletakkan peran perencanaan dan pengendalian alokasi sumber ekonomi di tangan manajemen menengah dan bawah. Dengan gaya operasi ini, *sense of control* atau tumbuh dalam diri manajemen menengah dan bawah sehingga pengendalian cenderung rendah

- e. Struktur Organisasi. Struktur organisasi suatu entitas membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Ini biasanya juga menghubungkan garis arus komunikasi. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional usaha dan menaksir bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dilaksanakan. Struktur organisasi memberikan rerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktifitas entitas. Pengembangan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
- f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggung jawaban konsumsi sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika kepada seorang manajer dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini akan berakibat timbulnya

iklim yang mendorong ketidak beresan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

- g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap struktur pengendalian intern. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur struktur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Struktur pengendalian intern yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan tidak kompeten dan tidak jujur. Namun karyawan yang kompeten dan jujur bukan merupakan satu-satunya unsur struktur pengendalian intern. Mereka dapat bosan atau tidak puas dengan pekerjaan, memiliki masalah pribadi yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi mereka atau tujuan mereka tidak lagi sesuai dengan tujuan perusahaan. Karena pentingnya karyawan yang kompeten dan jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.

Informasi tentang lingkungan pengendalian umumnya dikumpulkan oleh auditor dengan cara permintaan keterangan dari manajer yang bertanggungjawab atas unsur pengendalian intern, inspeksi dokumen dan catatan, dan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Sebagai contoh, auditor mengumpulkan informasi tentang keseriusan manajemen puncak terhadap penggunaan anggaran sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian.

Auditor akan meminta keterangan dari manajer departemen anggaran untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak dalam penyusunan anggaran, tindakan yang dilakukan oleh manajemen puncak dalam hal realisasi menyimpang jauh dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil permintaan keterangan ini, auditor melakukan inspeksi terhadap dokumen anggaran yang dibuat oleh perusahaan, laporan realisasi anggaran, dan laporan tindakan untuk mengatasi penyimpangan pelaksanaan anggaran.

Penaksiran Risiko

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip berterima umum. Penaksiran resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Pemeriksaan resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti:

1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.
2. Perubahan standar akuntansi.
3. Hukum dan peraturan baru.
4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.
5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat didalam fungsi tersebut.

Auditor harus mengumpulkan informasi tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar, dan kepedualian manajemen terhadap risiko tersebut serta bagaimana manajemen merancang aktivitas pengendalian untuk mengatasi risiko tersebut.

Di samping itu, auditor juga harus mengumpulkan informasi tentang respon manajemen terhadap perubahan keadaan, baik intern maupun ekstern, dan pengaruhnya pada risiko pengendalian.

Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan hutang entitas tersebut. Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada didalam maupun diluar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam struktur pengendalian intern.

Sistem informasi entitas sangat menentukan risiko salah saji dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi yang didesain dan diimplementasikan dengan baik akan menghasilkan informasi yang andal. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi manajemen dilaporan keuangan.

SA Seksi 319 memberikan panduan tentang informasi yang harus dikumpulkan oleh auditor untuk memahami sistem akuntansi kliennya:

1. Golongan utama transaksi dalam kegiatan perusahaan.
2. Bagaimana transaksi tersebut timbul dan dilaksanakan.
3. Catatan akuntansi, dokumen sumber dan pendukung yang digunakan, informasi yang hanya dapat dibaca dengan mesin (*machine readable information*), akun yang terkait dalam laporan keuangan yang

bersangkutan dengan pengolahan dan pelaporan transaksi.

4. Proses pengolahan data akuntansi yang dilakukan sejak saat transaksi terjadi sampai disajikan dalam laporan keuangan, termasuk bagaimana komputer digunakan untuk mengolah data tersebut.
5. Proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan, termasuk penaksiran akuntansi penting yang digunakan oleh manajemen.

Aktifitas Pengendalian

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi.

Sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian (yang mencerminkan sikap dan tindakan penting terhadap pengendalian), dan informasi dan komunikasi (yang memproses transaksi dan menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan hutang), suatu entitas memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan *audit* atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian pengolahan informasi
 - a. Pengendalian umum
 - b. Pengendalian aplikasi, meliputi otorisasi memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai, serta pengecekan secara independen
2. Pemisahan fungsi yang memadai
3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan
4. *Review* atas kinerja

Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah struktur pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah struktur pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. Keberhasilan implementasi dari PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP tentunya harus dilakukan secara berhati-hati, bertahap, dan melalui evaluasi secara terus menerus agar dapat diterapkan secara efektif.

Auditor harus memahami jenis aktifitas yang digunakan oleh klien untuk memantau efektifitas struktur pengendalian intern dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang andal. Di samping itu, auditor harus pula memahami tindakan-tindakan yang diambil untuk memperbaiki unsur-unsur pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemantauan. Informasi hasil pemantauan yang dilakukan oleh auditor intern sangat bermanfaat bagi auditor independen.

Keberadaan akuntan yang tergabung dalam IAI oleh masyarakat luas dinilai mempunyai fungsi dan peran sangat strategis dalam meningkatkan kualitas SPI dan efisiensi perekonomian nasional secara makro maupun mikro. Melalui hasil-hasil kerja yang berkualitas baik sebagai akuntan auditor maupun akuntan manajemen, diharapkan mampu melakukan cegah dini sekaligus memberikan kontribusi proses perbaikan terhadap perilaku bisnis yang merugikan jalannya roda perekonomian dan prospek dunia usaha yang dapat berdampak terjadinya krisis ekonomi nasional. Namun masih terdengar adanya kritik bahwa efektifitas kinerja para akuntan selama ini belum optimal memberikan kontribusi manfaat yang signifikan menjadi salah satu "*driving force*" dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance* dan *good corporate governance* di lingkungan birokrasi pemerintah maupun BUMN. *Output* (dampak) operasi auditnya

kurang bersifat *structural* cenderung berwawasan mikro dan rendah daya preventifnya.

IAI sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang anggotanya tersebar di berbagai profesi sebagai akuntan publik, auditor internal dan eksternal pemerintah, akuntan manajemen maupun akuntan pendidik, dalam menghadapi era globalisasi dan transparansi ekonomi sangat diharapkan terus berperan menciptakan sistem akuntansi yang berkualitas dan terintegrasi sehingga menghasilkan pencatatan dan pelaporan secara tertib, andal dan akuntabel.

Dengan adanya sistem akuntansi yang berkualitas ini, maka akan membawa bisnis menjadi efektif dan efisien karena pelaku bisnis dapat menghitung asset, aktivitas dan prospek usahanya ada kepastian terhindar dari risiko yang tidak terkendali. Hasil kerja akuntan diyakini mampu melakukan proses *costing and budgeting* (pengendalian biaya dan penganggaran) yang mendorong efisiensi harga pokok produksi dan optimalisasi pendapatan yang pada gilirannya dapat dicapai keuntungan serta daya saing yang tinggi. Berkaitan dengan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang esensinya anggaran berbasis kinerja, serta penerapan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterapkan di seluruh lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat memerlukan kompetensi dan keahlian para akuntan.

Dalam konteks ini, keahlian akuntan yang berada di sektor publik diharapkan dari keahlian profesinya dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara/daerah.

Harus dipahami bersama bahwa penegakan etika profesi dan independensi

akuntan sebagai pilar pengawal *good governance* dan *good corporate governance* saat ini menjadi suatu hal yang mendesak. Salah satu ciri khas gerakan reformasi adalah tuntutan akan pemerintah yang bersih. Akuntan dengan keunggulan profesinya harus terlibat secara proaktif menjadi garda terdepan dalam mewujudkan transparansi ekonomi dan etika bisnis yang terpuji. Para akuntan Indonesia yang tergabung dalam IAI harus berperan sebagai salah satu "*pillar of integrity*" perlu membangun aliansi strategis dengan lembaga penegak hukum dan kelompok masyarakat madani (*social society*) dalam mendorong terbentuknya semacam Pulau-Pulau Integritas (*island of integrity*) di masing-masing lingkungan organisasinya, baik pemerintah atau BUMN maupun swasta.

Pengalaman di masa awal reformasi hendaknya dijadikan hikmah IAI berkaitan dengan sorotan tajam masyarakat bahwa secara moral profesi para akuntan Indonesia dianggap ikut bertanggungjawab terjadinya keterpurukan ekonomi nasional. Dimasa lalu, rendahnya kredibilitas akuntan Indonesia di mata dunia internasional mengakibatkan adanya keharusan penunjukkan akuntan asing untuk melakukan *due diligence* dalam berbagai sektor publik dan kasus-kasus perbankan atau bidang ekonomi. Berkaitan dengan peran akuntan internal auditor dalam menegakkan *good governance* dan penindakan perilaku menyimpang etika bisnis atau KKN adalah tuntutan yang berkembang sekarang ini agar akuntan internal auditor dapat berperan sebagai '*whistleblower*' (orang dalam dari organisasi yang melaporkan tindak kecurangan diorganisasinya kepada pihak luar).

Diakui memang pelaporan adanya penyimpangan kepada penegak hukum di satu sisi dianggap positif dalam upaya membantu pemberantasan KKN dan membangun transparansi ekonomi bisnis. Namun demikian IAI dalam menyikapi '*whistleblower*' harus dengan penuh kehati-hatian dan perlu menyiapkan aturan mainnya terlebih dahulu secara jelas.

SIMPULAN

Pelajaran penting dari krisis keuangan global adalah perlunya penegakan etika dan nilai-nilai luhur dalam menjalankan roda



pemerintahan dan organisasi bisnis melalui penguatan implementasi sistem pengendalian intern yang dikawal oleh akuntan profesional dan berintegrasi tinggi. Pengalaman di masa awal reformasi hendaknya dijadikan hikmah IAI berkaitan dengan sorotan tajam masyarakat bahwa secara moral profesi para akuntan Indonesia

dianggap ikut bertanggungjawab terjadinya keterpurukan ekonomi nasional. Di masa lalu, rendahnya kredibilitas akuntan Indonesia di mata dunia internasional mengakibatkan adanya keharusan penunjukkan akuntan asing untuk melakukan *due diligence* dalam berbagai sektor publik dan kasus-kasus perbankan/bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A. Arens, and James K. Loebbecke, C.P.A. 1997. *Auditing An Integrated Approach*. New Jersey: Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs.
- Boynton, William C, and Walter G.Kell. 1997. *Modern Auditing*. Sixth Edition. New York: John Wiley & Sons.
- George H. Bodnar, and William S. Hopwood. *Accounting Information System*. Sixth Edition.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 2001*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.